

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (ed.)). Sinar Grafika.
- Arba, H. (2019). *Hukum Agraria Indonesia* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Abd.Rahman, B. M. (2017). *Politik Hukum Pertanahan* (Andi Gunawan Ratu Chakti (ed.)). Celebes Media Perkasa
- Bernhard Limbong. (2012). *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha.
- Diyana Isnaeni, S. (2018). *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Wisma Kalimetro.
- D, N. A. (2020). *Administrasi Pertanahan*. Universitas Terbuka.
- Fifik Wiryani. (2018). *Hukum Agraria Konsep Dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan* (Setara Press (ed.)).
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan
- Indira Retno Aryanti, Omemar Moechthar, A. M. W. (2019). *Pemahaman Seputar Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun* (Tika Lestari (ed.)). CV. Jakad Media Publising.
- Ismail, I. (2011). *Konsep Hak Garap Atas Tanah*. Ciptapustaka Media Perintis.
- Ismail, N. (2018). *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. Setara Press.
- Lubis, M. Y. L. & R. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. CV.Mandar Maju.
- Nanik Sutarni. (2022). *Implementasi Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang* (B. Pranawa (ed.)). Lakeisha.
- Kolopaking, A. D. . (2013). *Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*. PT Alumni.
- Sahnan. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*. Cita Intrans Selaras.
- Sangsun, F. S. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Santoso, U. (2017a). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Kencana.
- Santoso, U. (2017b). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana.
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.

- Sembiring, J. J. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia.
- Sugianto, L. (2017). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Deepublish.
- Suharyono M.hadiwiyono. (2020). *Hukum Pertanahan Di Indonesia* (M. S. Is (ed.)). Inteligencia Media.
- Supriadi. (2019). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya* (Ade Hairul Rachman (ed.)). Sinar Grafik.
- Titahelu, R. Z. (2016). *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafat dan Teoretik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah Di Indonesia)*. CV Budi Utama.
- Urip Santosi. (2016). *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Kencana.
- Waskito, H. A. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

A. Sumber Lain

- Aksinudin, S. (2018). Legal Assurance of the right of the certified land against adat law in the land law system in Indonesia. *Sampurasun*, 4(), 29–40.
- Ana Ema Safitri. (2022). *PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) Prespektif MAS}LAH{AH (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)* SKRIPSI.

- Ardani, M. N. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia. *Law Reform*, 13(2), 204. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156>
- Christian, M., Paisina, S., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2021). *Hak Milik Atas Tanah Adat Di Wilayah Kepulauan sebagai bangsa . Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum Barat Kecamatan Taniwel Timur Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe , untuk semua mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa . Untuk itu ta. 1(2), 62–72.*
- Fadhillah, T. E., Ismail, I., & Rinaldi, Y. (2021). *Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat). 6(38), 174–190.*
- <https://www.bola.com/ragam/read/4514123/pengertian-musyawaharah-ciri-ciri-tujuan-manfaat-prinsip-dan-contoh-yang-perlu-dipahami>
- <https://pkpajakarta.com/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/>
- Klaudius Ilkam Hulu. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Panah Keadilan*, 1(1), 27–31.
- Kumara, I. M. C. G., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 560–563. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4013.560-563>
- Kusumadara, A. (2013). Perkembangan Hak Negara Atas Tanah. *Jurnal Media Hukum*, 20(3), 262–276.
- Lembong4, A. W. L. G. N. M. R. R. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertipikat Ganda1. IX(8), 205–211.*
- Lisasih, H. A. dan N. Y. (n.d.). *KULIAH KE 11 ONLINE HUKUM ADAT TRANSAKSI TANAH Disusun oleh: Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa UngguL. 6.*
- Medisa, F. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Pakai Yang Digugat Oleh Pemilik SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) Dikaitkan Dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tantang Dasar Pokok-Pokok Agraria.*
- Mulyadi, S. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA Mulyadi., *Yuridis*, 6(1), 147–173.
- Mustarin, B. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan

Tidak Bersertifikat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 397–412. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750>

- Nasrudin, laily Washliati, F. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN KANTOR PERTANAHAN. *jurnal hukum*, 14(2), 37–55.
- Radjawane, P. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT. *sasi*, 22, 66.
- Rusli Akib, D. (2021). ALAT BUKTI GANDA HAK GARAP TANAH KELOMPOK TANI PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL Rusli Akib 1* , Husni Thamrin 2. 4(2), 59–66.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, IV(1).
- Sulasiyah Amini. (2022). PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH: PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM. *Hukum dan Kenotariatan*, 6, 1326–1340.
- Wasono, D. D. (n.d.). KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) SEBAGAI BUKTI HUKUM PENGUASAAN ATAS SEBIDANG TANAH (Studi Di Kota Pontianak). *Sunday Independent*1, 1–33.